

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LANDASAN TEORITIS

1. Teori Agensi

Teori keagenan (*Agency theory*) mencoba menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditur, dan manajer. Konflik yang dimaksud dapat dilihat dari kebijakan dividen, pendanaan, dan kebijakan investasi (Jensen and Meckling, 1976). Informasi tentang perusahaan lebih banyak diketahui oleh manajer (*agent*) sebagai pengelola dibandingkan pemilik perusahaan (*principal*). Sehingga manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan (Jensen and Meckling, 1976).

Teori keagenan berfokus pada hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Pemilik perusahaan biasanya diistilahkan sebagai *principal* sedangkan pihak manajemen yang mendapat mandat dari pihak pemilik disebut sebagai *agent*. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak *principal* dan pihak *agent* harus saling menguntungkan, apabila dari kedua belah pihak menaati komitmen yang sudah disepakati sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja. Pihak *agent* dituntut untuk mencurahkan kemampuan profesionalnya dalam mengelola perusahaan, dan sedangkan dari pihak *principal* atau pemilik perusahaan, berkewajiban memberikan *fee* kepada pihak agen sebagai balas jasa.

Arfan Ikhsan Lubis dalam bukunya menjelaskan gambaran tentang teori keagenan, dari sudut pandang teori agensi, pemilik perusahaan (*principal*)





membawahi manajer (*agent*) untuk melaksanakan kinerja yang efisien. *Principal* dan *agent* sebenarnya merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pribadi masing-masing. *Agent* tidak akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Hal ini disebabkan *agent* memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraannya. Adanya perbedaan kepentingan ini yang nanti akan berakibat menimbulkan asimetri informasi dan juga konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal*, dimana masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri (Lubis 2011:91) (dalam Arrazzaq, 2017).

Dalam kerangka teori keagenan, terdapat tiga macam hubungan keagenan menurut Chariri dan Ghazali (2007) (dalam Arrazzaq, 2017), yaitu: (1) hubungan manajemen dengan pemilik (pemegang saham), (2) hubungan manajemen dengan kreditur dan (3) hubungan manajemen dengan pemerintah. Pandangan teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak *agent* dan *principal* yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Pihak manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan *principal*. Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak dengan mengaplikasikan prinsip konservatisme akuntansi.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan karena menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen yang tercermin dari laporan keuangan. Sehingga dapat mengakibatkan timbulnya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) untuk kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan berfokus pada bertambahnya hasil keuangan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



investasi di perusahaan, sedangkan manajer akan berfokus pada kompensasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan atas prestasinya. Hubungan teori keagenan dengan konservatisme dapat mengurangi biaya agensi, meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan, serta para pemegang saham menginginkan manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Konservatisme

a. Definisi Konservatisme

Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (*outcome*) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatis juga mengandung makna sikap hati-hati dalam menghadapi resiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Implikasi konsep konservatis terhadap pelaporan keuangan adalah bahwa pada umumnya akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar akan terjadi tetapi tidak mengantisipasi untung atau pendapatan yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar (Suwardjono 2013:245) (dalam Arrazaaq, 2017).

Menurut Watts (dalam Savitri, 2016:22) konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan laba atau aktiva yang lebih rendah serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melaporkan hutang lebih tinggi. Dengan demikian, pemberi pinjaman akan menerima perlindungan atas risiko menurun (*downside risk*) dari neraca yang menyajikan aset bersih dan laporan keuangan yang melaporkan berita buruk secara tepat waktu (Haniati dan Fitriany dalam Savitri, 2016:23). Menurut Givoly dan Hayn (dalam Savitri, 2016:23) konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.

Menurut Aristiyya dan Budiharta (2014), dari sekian banyak prinsip akuntansi, konservatisme merupakan salah satu prinsip yang perlu kita kupas lebih dalam. Selama ini, konservatisme selalu menjadi perbincangan. Nampaknya prinsip konservatisme cukup kontroversial khususnya di kalangan para akuntan di mana sebagian dari mereka beranggapan konservatisme merupakan prinsip yang wajib dianut dalam menyusun laporan keuangan supaya sifat manajemen yang pada umumnya terlalu optimis dalam menghadapi ketidakpastian dapat dikendalikan. Di sisi lain, ada juga yang beranggapan bahwa konservatisme merupakan prinsip yang dapat menimbulkan informasi yang bias dalam laporan keuangan karena laporan keuangan yang disusun atas dasar konservatisme akan menghasilkan penilaian yang *understated*.

Konservatisme dapat didefinisikan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earnings*) (Basu, 1997) (dalam Wardhani, 2008). Secara tradisional, konservatisme dalam akuntansi dapat diterjemahkan melalui pernyataan “tidak mengantisipasi keuntungan, tetapi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mengantisipasi semua kerugian” (Bliss, 1924 dalam Watts, 2003a) (dalam Wardhani, 2008). Konservatisme dalam akuntansi ini mengimplikasikan adanya persyaratan verifikasi yang asimetris antara pengakuan laba dan rugi. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat perbedaan dalam verifikasi yang disyaratkan untuk pengakuan laba versus pengakuan rugi, maka semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansinya (Watts, 2003a) (dalam Wardhani, 2008).

b. Jenis Konservatisme

Konservatisme umumnya dipahami dalam 2 jenis konservatisme. Penyebutan mengenai 2 jenis konservatisme ini dapat dinamakan berbeda-beda, namun secara konseptual akan mengacu hanya kepada 2 jenis konservatisme saja. Perbedaan akan dua jenis konservatisme, yang pertama kali adalah konservatisme yang diidentifikasi sebagai *konservatisme ex ante (unconditional)* dan *konservatisme ex post (conditional)* (Chan et al, 2009) (dalam Savitri, 2016:35).

Konservatisme ex ante atau *unconditional conservatism* adalah konservatisme yang berdasarkan akuntansi, terkait dengan neraca, dan tidak terkait atau bergantung pada terdapatnya berita (baik atau buruk) artinya konservatisme jenis ini bersifat independen dari adanya berita baik atau berita buruk di lingkungan bisnis perusahaan. Secara akuntansi, konservatisme jenis ini misalnya adalah karena tidak melakukan pencatatan *goodwill* atau melakukan pembebanan yang relatif cepat terhadap aktivitas R&D, aktivitas pemasaran (periklanan) atau penggunaan metode pengalokasian yang bersifat akselerasi (depresiasi saldo menurun ganda), sehingga akibatnya dapat terjadi nilai buku aset yang *understated*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Konservatisme jenis ini menghasilkan *earnings* yang lebih konsisten dalam jangka panjang karena konservatisme yang dilakukan terkandung dalam kebijakan akuntansi yang dilakukan, dimana konsistensi perlakuan akuntansinya relatif lebih konsisten.

Di sisi lain, Basu (1997) (dalam Savitri, 2016:36) diakui dalam literatur akuntansi mengenai konservatisme sebagai pencetus konsep konservatisme jenis lainnya yaitu yang bersifat kondisional atau *konservatisme ex post*. Konservatisme jenis ini adalah konservatisme yang berdasarkan kondisi pasar, terkait dengan *earnings* dan bergantung pada berita (*news dependent*), maksudnya adalah bahwa konservatisme bentuk ini merupakan reaksi atau tanggapan dari perusahaan yang melakukan verifikasi yang berbeda sebagai penyerapan informasi yang terdapat dalam lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi *earnings* perusahaan berkaitan dengan informasi yang dapat berakibat pada terdapatnya *gains* dan *losses* ekonomis.

Akuntansi bersifat konservatif bila pengakuan terhadap berita yang mengindikasikan adanya *losses* ekonomis lebih tepat waktu (*timely*) dibandingkan pengakuan terhadap *gains* ekonomis dan dapat juga mencakup suatu tingkat tertentu dari diskresi manajerial yang dilakukan oleh seorang manajer yang tercermin di dalam laporan keuangan karena manajer dapat menentukan *timing* dan jumlah dari *asset write down* atau *restructuring charges* yang diakui. Dalam hal ini, efek dari konservatisme kondisional terhadap aliran *earnings* dapat kurang konsisten dalam jangka panjang dan lebih sulit bagi investor untuk mendeteksi konservatisme jenis ini.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. IFRS dan Konservatisme

International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian (*revaluation*) profesional dengan *disclosures* yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis lintas negara.

Untuk itu diperlukan suatu standar internasional yang berlaku sama di semua negara untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Perbedaan utama standar internasional ini dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan *revaluation model*, yaitu kemungkinan penilaian aktiva menggunakan nilai wajar, sehingga laporan keuangan disajikan dengan basis *true and fair*. Mengadopsi IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar dunia (*global market*).

Lembaga profesi akuntansi IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) menetapkan bahwa Indonesia akan melakukan konvergensi penuh (*full convergence*) IFRS pada 1 Januari 2012. Dalam melakukan konvergensi IFRS, terdapat dua macam strategi adopsi, yaitu *big bang strategy* dan *gradual strategy*. *Big bang strategy* mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara-negara maju. Sedangkan pada *gradual strategy*, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penerapan IFRS di Indonesia menyebabkan pergeseran pada konsep konservatisme. Karena IFRS lebih berfokus pada penyajian laporan keuangan yang relevan sehingga menyebabkan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap estimasi dan berbagai *judgement*. Selain itu IFRS berdasarkan *prinsipal based* lebih banyak menggunakan *professional judgement* dalam melakukan penilaian suatu akun. *Professional judgement* ini membuat perusahaan menjadi lebih optimis karena dapat mengakui perubahan nilai suatu akun sesuai dengan nilai wajar.

Konsep konservatisme semakin mengalami pergeseran ketika IASB memperkenalkan sebuah prinsip baru yaitu *prudence*. Dimana *prudence* merupakan prinsip kehati-hatian yang memperbolehkan manajer mengakui pendapatan meskipun masih berupa potensi sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) dalam IFRS.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang menggunakan konsep *prudence* adalah PSAK No.14 tentang Persediaan dan PSAK No. 48 tentang Penurunan Nilai Aset. Dalam PSAK No. 14 dijelaskan bahwa persediaan dalam neraca disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih, sedangkan dalam PSAK No.48 dijelaskan bahwa penurunan nilai aset merupakan rugi yang harus segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Menurut *The Association of Chartered Certified Accountants* (2014) menyebutkan tentang *prudence* dalam IAS (*International Accounting Standard*) adalah IAS 18 dan IAS 37.

- Dalam IAS 18 dijelaskan bahwa pendapatan menguraikan persyaratan akuntansi untuk kapan harus mengakui pendapatan dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penjualan barang, rendering layanan, dan untuk bunga, royalti dan dividen. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari pertimbangan yang diterima atau piutang dan diakui ketika kondisi yang ditentukan terpenuhi, yang tergantung pada sifat dari pendapatan.

- Dalam IAS 37 dijelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aktiva kontinjensi dan bahwa informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan pengguna untuk memahami sifat mereka, waktu, dan jumlah.

d. Alasan Konservatisme Masih Bertahan

Walaupun secara konseptual terasa bahwa konservatisme menghasilkan masalah karena konservatisme menyebabkan akuntansi tidak melaporkan *true value* secara tepat, namun pada kenyataannya prinsip ini masih diterapkan oleh para akuntan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan konservatisme masih layak untuk diterapkan dalam akuntansi. Watts (2003) mengungkapkan bahwa konservatisme masih diterapkan karena pengguna masih merasakan benefit dari pelaporan yang konservatif ini. Adanya penerapan konservatisme akan membatasi perilaku oportunistik manajer dan konservatisme merupakan suatu penyeimbang bila terdapat bias manajerial dengan tuntutan verifikasi yang bersifat asimetris sehingga dengan adanya usaha menyeimbangkan antara tindakan oportunistik manajer dengan kewajiban melakukan verifikasi terlebih dahulu akan menyebabkan pelaporan tidak akan bersikap berlebihan namun juga tidak kerendahan. Di sisi lain, konservatisme dapat meningkatkan nilai perusahaan karena konservatisme membatasi pembayaran kepada pihak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajer ataupun pihak lain (*shareholders*) yang bersifat opportunistik (alasan *contracting*). Transaksi-transaksi yang menguntungkan pihak di luar perusahaan harus diverifikasi lebih mendalam berdasarkan konsep konservatisme ini sehingga akan mencegah terjadinya halhal yang opportunistik.

Terkait dengan litigasi atau tuntutan hukum maka litigasi lebih kecil kemungkinannya terjadi bagi perusahaan yang meng *understate net asset* dibanding *engover state net asset* (alasan *litigation*). Masalah-masalah hukum yang umumnya menjerat auditor dan perusahaan karena terjadinya kebangrutan yang merugikan investor umumnya terjadi karena adanya *overstatement* dan bukan *understatement*. Selain itu investor cenderung bersifat *risk averse* sehingga *understatement* lebih dirasa aman dibandingkan *overstatement* yang berisiko lebih menyesatkan bagi pengambilan keputusan seorang investor dibandingkan kondisi *understatement*.

Bagi perusahaan yang mampu menghasilkan profit maka pengakuan yang asimetris antara *gains* dan *losses* (menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan beban) akan mengurangi *present value* dari pajak (menunda pembayaran pajak) dan meningkatkan nilai perusahaan. Penentu standar akuntansi dan otoritas regulator juga diuntungkan dengan lebih sedikitnya kemungkinan datangnya kritik karena terjadinya perusahaan yang melakukan *overstate* nilai *net asset* dibandingkan bila perusahaan melakukan *understate* dari *net assetnya* (alasan *political cost*).

Jadi setidaknya bagi para pengambil keputusan yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan maka isi dari

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan yang *understated* dirasa lebih menguntungkan karena mengurangi risiko kerugian yang lebih besar bila laporan keuangan dilaporkan secara *overstatement*. Dengan demikian tampaknya pengguna laporan keuangan lebih nyaman dengan terdapatnya konservatisme di dalam akuntansi.

e. Pengukuran Konservatisme

Watts (2003) (dalam Savitri, 2016:45) membagi konservatisme menjadi 3 pengukuran, yaitu *Earning/Stock Return Relation Measure*, *Earning/Accrual Measures*, *Net Asset Measure*. Berbagai peneliti telah mengajukan berbagai metode pengukuran konservatisme. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watt (2003) (dalam Savitri, 2016:45) :

(1) *Earning/Stock Return Relation Measure*

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba tetap dilaporkan sesuai dengan waktunya. Basu (1997) (dalam Savitri, 2016:45) menyatakan bahwa konservatisme menyebabkan kejadian-kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan). Hal ini disebabkan karena kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan harus segera diakui sehingga mengakibatkan *bad news* lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan *good news*. Dalam modelnya basu menggunakan model *piecewise-linear regression* sebagai berikut:

$$\Delta NI = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta NI_{t-1} + \alpha_2 D \Delta NI_{t-1} + \alpha_3 D \Delta NI_{t-1} \times \Delta NI_{t-1} + \varepsilon_t$$



Dimana ΔNI_t adalah *net income* sebelum adanya *extraordinary items* dari tahun t-1 hingga t, yang diukur dengan menggunakan *total assets* awal nilai buku. Sedangkan $D\Delta NI_{t-1}$ adalah *dummy variable*, dimana bernilai 1 jika perubahan ΔNI_{t-1} bernilai negatif.

(2) *Earning/Accrual Measures*

(a) *Model Givoly dan Hayn (2000)*

Menurut Dwiputro (2009) (dalam Savitri, 2016:46) dalam tulisannya menjelaskan bahwa Givoly dan Hyan memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya. Dengan begitu, laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif. Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari



kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam *net income* tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan.

(b) *Model Zhang (2007)*

Zhang (2007) (dalam Savitri, 2016:47) menggunakan *conv_accrual* sebagai salah satu pengukuran konservatisme. *Conv_accrual* didapatkan dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. Akrual non operasi memperlihatkan pencatatan kejadian buruk yang terjadi dalam perusahaan, contohnya biaya restrukturisasi dan penghapusan aset. Dalam penelitiannya Zhang (2007) (dalam Savitri, 2016:47) mengalikan *conv_accrual* dengan -1 bertujuan untuk mempermudah analisa. Dimana, semakin tinggi nilai *conv_accrual* menunjukkan penerapan konservatisme yang semakin tinggi juga.

(c) *Discretionary Accrual*

Model akrual lainnya yang juga dapat digunakan sebagai pengukuran konservatisme adalah model *discretionary accruals* (Winata, 2008 dalam Dachi, 2010) (dalam Savitri, 2016:47). Terdapat beberapa model untuk menghitung *Discretionary Accrual*. *Discretionary Accrual* yang paling sering digunakan adalah *discretionary accrual model Kasznik (1999)*. Kasznik (1999) memodifikasi model Dechow *et al.* (1995) dengan memasukkan unsur selisih arus kas operasional (ΔCFO) untuk mendapatkan nilai akrual non-diskresioner dan akrual diskresioner. Karena Kasznik

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1999) berpendapat bahwa perubahan arus kas dari hasil operasi perusahaan akan berkorelasi negatif dengan total akrual.

(3) *Net Asset Measure*

Ukuran ketiga yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan keuangan adalah nilai aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*. Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) (dalam Savitri, 2016:48) yaitu dengan menggunakan *market to book ratio* yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.

Penggunaan *net asset* dapat dilihat dalam model Feltham-Ohlson yang mengukur besarnya *undervaluation* dari *net asset* dengan cara mencari nilai parameter yang mencerminkan tingkat *understatement* dari *operating assets* terkait dengan asumsi bahwa depresiasi secara akuntansi umumnya melebihi depresiasi secara ekonomis.

Selain itu penggunaan pengukuran dengan *net asset* dapat dilihat dalam pengukuran yang dilakukan oleh Ahmed *et. al* (2000) (dalam Savitri, 2016:49) yang menghasilkan nilai estimasi *understatement* dengan meregresi *goodwill* perusahaan terhadap *abnormal earnings*, *lagged operating assets* dan *contemporaneous investment in operating assets* dalam hal ini *goodwill* dihitung dengan rumus *market value of equity* dikurangi *book value of net asset*. Bila BV dari net asset adalah *understated*, *goodwill*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

adalah *overstated*, koefisien dari *lagged operating assets* harus bernilai positif bila konservatisme *understates the lagged asset*.

Pengukuran dengan menggunakan regresi dilakukan juga oleh Myers (1999) (dalam Savitri, 2016:49) dengan meregresi secara *time series abnormal earnings* terhadap *lagged abnormal earnings* dan *lagged book value of operating assets*. Pada prinsipnya nilai dari konservatisme didapat dari besarnya nilai aset bersih yang *understated*. Penelitian lain misalnya Beaver dan Ryan menggunakan nilai *book-to-market ratio* perusahaan untuk mengukur konservatisme dengan asumsi bahwa perusahaan yang menggunakan konservatisme akan melaporkan nilai *net asset* yang lebih rendah dan nilai rasio *book-to-market* yang lebih rendah pula.

Pengukuran bentuk lainnya adalah menggunakan ukuran dari *earnings* atau akrual. Dasar penggunaan akrual sebagai ukuran konservatisme adalah karena dengan adanya konservatisme maka *losses* akan cenderung tercakup sepenuhnya dalam nilai akrual sedangkan *gains* tidak, maka akrual secara periodik akan cenderung bernilai negatif dan nilai akrual secara akumulasi akan cenderung *understated*. Akibatnya, nilai akrual periodik bersih yang bernilai negatif dan nilai kumulatif akrual negatif yang diakumulasikan sepanjang periode dapat digunakan sebagai ukuran konservatisme. Di sisi lain, konservatisme dianggap mengurangi akumulasi *earnings* yang dilaporkan dari waktu ke waktu, karena itu tanda dan magnitude dari nilai akrual yang diakumulasikan dari waktu ke waktu dapat dijadikan pengukuran untuk konservatisme. Penggunaan *earnings* sebagai ukuran konservatisme adalah karena dengan adanya konservatisme diprediksi bahwa perubahan dari *negative earnings* ke *positive earnings*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperiode berikutnya lebih mungkin terjadi. Hal ini konsisten dengan pemikiran bahwa *write-off due to conservatism causing negative earnings changes*.

Pengukuran lainnya adalah mengkaitkan nilai *earnings* dengan nilai *return* saham dimana dikonsepsikan bahwa harga pasar saham cenderung mencerminkan perubahan nilai aset pada saat perubahan tersebut terjadi, dimana perubahan tersebut mengimplikasikan *losses* atau *gains* dalam nilai aset, karena itu *return* saham cenderung lebih tepat waktu merefleksikan perubahan tersebut.

Namun demikian, secara lebih spesifik maka berikut ini adalah pendefinisian secara operasional yang sering digunakan dalam mengukur konservatisme (dalam Savitri, 2016:50-53):

(a) Basu (1997) *asymmetric timeliness of earnings measure* (AT)

Rumusnya:

$$\frac{EPS_{it}}{P_{it}} = \alpha_0 + \alpha_1 DR_{it} + \beta_0 R_{it} + \beta_1 R_{it} DR_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

EPS_{it} : *Earnings per share* untuk perusahaan i tahun t

P_{it} : Harga pasar pembukaan untuk perusahaan i tahun t

R_{it} : *Return* saham perusahaan i tahun t

DR_{it} : 1 bila *return* pasar untuk perusahaan i pada tahun t adalah negatif dan 0 bila sebaliknya.

(b) Ball dan Shivakumar (2005) *asymmetric cash flow to accruals measure* (AACF).

Rumusnya:

$$ACC_{it} = \beta_0 + \beta_1 DCFO_t + \beta_2 CFO_t + \beta_3 DCFO_t \times CFO_t + \varepsilon_t$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keterangan:

ACC_t : Akrua yang diukur dengan *Net Income* - Arus Kas Total

$DCFO_t$: Dummy 0 bila CFO_t lebih besar sama dengan 0 dan 1 bila

CFO_t lebih kecil dari 0

CFO_t : Arus Kas Operasi tahun t

(c) Rasio *Market to Book* (atau *Book to Market*) (MTB atau BTM)

Rumusnya menggunakan *fixed effect panel data regression*:

$$BMT_{t,i} = \alpha_t + \alpha_i + \beta_j R_{t-j,i} + \varepsilon_{t,i}$$

Keterangan:

BTM_{it} : *book to market* ratio perusahaan i pada akhir tahun t

α_t : *year to year variation in the BTM common to the sample firms*

α_i : *Bias component* dari BTM untuk perusahaan i

$R_{t-j,i}$: *Return on Equity (ROE)* selama 6 tahun sebelum tahun t

(d) Penman dan Zhang (2002) *Hidden Reserves Measure (HR)*

Rumusnya:

$$Cit = \frac{ER_{it}}{NOA_{it}}$$

$$ER_{it} = INV_{it}^{ers} + RD_{it}^{ers} + ADV_{it}^{ers}$$

Keterangan:

INV : *Inventory reserves*

RD : *R&D reserves*

ADV : *Brand asset*

(e) Adaptasi dari Givolyn dan Hayn (2000) *Conservatism Based On Accrued Items*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rumusnya:

$$CONACC = \frac{(NI - CFO)}{RTA} \times (-1)$$

Keterangan:

CONACC	: Tingkat konservatisme akuntansi
NI	: Laba sebelum <i>extraordinary items</i>
CFO	: Arus kas dari kegiatan operasional
RTA	: Rata-rata total aktiva

3. Good Corporate Governance

a. Definisi Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya yang juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah, dan Rika, 2004) (dalam Fitriani, 2014).

Definisi *Good Corporate Governance* yang dirumuskan dalam *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* Bab II adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan tata kelola korporat (*Corporate Governance*) adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintahan, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Menurut Tunggal (2013:149) (dalam Asward dan Lina, 2015), *corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditur, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

b. Prinsip *Good Corporate Governance*

Berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Berikut lima prinsip *Good Corporate Governance* menurut KNKG (2006) :

- *Fairness* (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham asing, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

- *Disclosure* dan *Transparency* (Transparansi)

Hak pemegang saham yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan dapat berperan serta dalam

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

- *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.

- *Responsibility* (Responibilitas)

Peran pemegang saham yang harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

- *Independency* (Independensi)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tidak ada dominasi atau intervensi dari salah satu organ perusahaan. Perusahaan juga harus menjaga keberlangsungan bisnisnya serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

c. **Manfaat Implementasi *Good Corporate Governance***

Berikut merupakan beberapa manfaat dalam melakukan penerapan *good corporate governance* (Fitriani, 2014) :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value* sebagaimana yang diungkapkan oleh Tjager, et al. Dalam Wilson Arafat (2008), bahwa secara teoritik, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri.
3. Meningkatkan kepercayaan investor. Sebagaimana diungkapkan oleh Newell dan Wilson dalam Wilson Arafat (2008) yang pada intinya menyatakan bahwa praktik *good corporate governance* yang dapat dijalankan dengan baik akan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan sebaliknya pelaksanaan *good corporate governance* yang buruk akan menurunkan tingkat kepercayaan mereka.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

d. Dewan Komisaris

Menurut FCGI, dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Lebih lanjut tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil;
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan. Salah satu fungsi utama dari komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya.

Dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi *board of directors* (terutama komisaris independen) dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. *Board of directors* yang kuat (*board of directors* yang didominasi oleh komisaris independen) akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Dilain pihak, *board of directors* yang didominasi oleh pihak internal atau *board of directors* yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif (kurang konservatif) (Ahmed dan Duellman, 2007) (dalam Wardhani, 2008).

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan secara luas dan keseluruhan. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Dengan menambah proporsi komisaris independen, maka perusahaan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap direksi dan manajer yang akan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan. Komisaris independen yang dimiliki sekurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman *good corporate governance* guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat (Herawati; Wardhani, 2008) (dalam Fitriani, 2014).

(2) Ukuran Dewan Komisaris

Jumlah dewan komisaris adalah jumlah yang tepat dari anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan (Savitri, 2016:67).

Jumlah anggota dewan komisaris merupakan elemen penting dari karakteristik dewan komisaris yang mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Penelitian Lara, *et al* (2005) (dalam Savitri, 2016:67) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat sebagai mekanisme *corporate governance* mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Komposisi anggota dewan komisaris yang tidak seimbang dengan dewan direksi akan menyebabkan komisaris mengalami kesulitan dalam berdiskusi dengan dewan direksi dan mengawasi kinerja perusahaan. Dewan komisaris

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan lebih menginginkan penerapan prinsip akuntansi yang konservatif untuk mencegah perilaku yang menyimpang dari direksi dan manajer.

Menurut Klein dalam Ahmed dan Duellman (2007) (dalam Savitri, 2016:68) ukuran dewan komisaris berhubungan dengan adanya komite audit yang menjalankan tugasnya secara lebih spesifik. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan.

Perusahaan harus menyesuaikan jumlah anggota dewan komisaris dengan tingkat kompleksitas perusahaan dan tetap memperhatikan efektivitas dalam pembuatan keputusan (KNKG, 2006). Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan.

Oleh sebab itu, diperlukan jumlah anggota dewan komisaris yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan supaya proses monitoring lebih efektif. Sehingga semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kekuatan dari dewan komisaris dalam melakukan pengawasan sehingga penggunaan akuntansi yang konservatif akan semakin tinggi pula.

e. **Komite Audit**

Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. *The Institute of*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Internal Auditors (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komite audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya komite audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga non-profit dan pemerintahan.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris.

Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

(1) Frekuensi Rapat Komite Audit

Menurut Putri (2017), dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan suatu perusahaan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tentu saja komite audit harus melakukan pengkajian laporan keuangan maupun penyegaran dengan dilakukannya rapat komite audit agar terbentuknya efisiensi laporan keuangan yang diinginkan. Dengan melakukan pertemuan yang rutin dan teratur akan mempermudah komite audit mempermudah komite audit dalam memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Dalam keputusan ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit poin 3 butir e (1) “Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar”. Disejalkan dengan ditukarkannya peraturan BAPEPAM yang dialihkan dengan POJK, maka dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pasal 13 “komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”.

f. **Manajemen Laba**

Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan mengelabui inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode atau prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum (Sulistyanto, 2008:6).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Earnings management merupakan isu yang paling sering diteliti di bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Hal ini disebabkan karena ukuran keuntungan perusahaan merupakan dasar untuk keputusan alokasi sumber daya perusahaan secara ekonomi. Kondisi ini mendorong manajer perusahaan untuk memanipulasi atau mengelola pendapatan perusahaan untuk transfer kekayaan dan keuntungan lainnya (Hettihewa, 2003) (dalam Anggraini dan Trisnawati, 2008).

Menurut Scott (2000) (dalam Anggraini dan Trisnawati, 2008), *earnings management* adalah suatu cara penyajian laba yang disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan oleh manajer, melalui pemilihan suatu set kebijakan akuntansi atau melalui pengelolaan akrual. Scott (2000) menyatakan bahwa *earnings management* berkaitan dengan pilihan manajemen atas kebijakan akuntansi sehingga tujuan manajemen dapat dicapai. Terdapat dua sudut pandang *earnings management*; pertama, *earnings management* merupakan perilaku manajemen yang oportunistik yang dikaitkan dengan maksimisasi kompensasi, kontrak utang dan biaya politik. Kedua, *earnings management* ditinjau dari sudut pandang pengkontrakan efisien (*efficient contracting*).

Earnings management merupakan pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus. *Earnings management* juga berkaitan dengan *moral hazard* karena *earnings management* dianggap sebagai ancaman moral bagi pengguna laporan keuangan. Menurut Healy dan Wahlen (1999) (dalam Anggraini dan Trisnawati, 2008), *earnings management* terjadi ketika manajemen menggunakan *judgment* dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan

keuangan, sehingga menyesatkan *stakeholder* tentang kinerja ekonomi perusahaan.

(1) Motivasi Manajemen Laba

Motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba, Scott (2003) (dalam Marlisa dan Fuadati, 2016) :

- (a) Rencana bonus (*bonus scheme*), manajer yang bekerja diperusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar memaksimalkan bonus yang akan diterimanya;
- (b) Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*), motivasi ini sejalan dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif, yaitu semakin dekat perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak;
- (c) Motivasi politik (*political motivation*), perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah;
- (d) Motivasi Perpajakan (*taxation motivation*), perpajakan merupakan suatu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan, maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah;
- (e) Pergantian CEO, CEO yang akan habis masa penugasannya akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bonusnya. Demikian pula dengan CEO yang kinerjanya kurang baik, akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya

- (f) Penawaran saham perdana (*initial public offering*), saat perusahaan *go public*, informasi keuangan yang ada dalam prospectus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai dengan sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan.

(2) Pola Manajemen Laba

Scott (2003:345) (dalam Anggraini dan Trisnawati, 2008) mengidentifikasi adanya empat pola yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba yaitu:

(a) *Taking a bath*

Dilakukan ketika terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dihindari, yaitu dengan cara mengakui biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan.

(b) *Income minimization*

Dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian politis. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan yang cepat dan sebagainya. Cara ini mirip dengan *taking a bath* tapi kurang ekstrim.

(c) *Income maximization*

Dilakukan dengan memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

suatu pelanggaran kontrak hutang jangka panjang, manajer perusahaan tersebut cenderung untuk memaksimalkan laba.

(d) *Income smoothing*

Merupakan bentuk manajemen laba yang paling sering digunakan dan paling populer. Dengan *income smoothing*, manajer menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





B. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Hellen Sanidhya Prahasita (2016)	Struktur kepemilikan, tata kelola perusahaan, dan konservatisme.	Dependen : Konservatisme Independen : (1) Independensi Komisaris (2) Kepemilikan Institusional (3) Kepemilikan Manajerial (4) Frekuensi pertemuan komite audit (5) Kualitas audit (6) <i>Leverage</i>	(1) independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi (2) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme (3) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme (4) frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap konservatisme (5) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap konservatisme (6) <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi
2.	Dwinita Wulandini dan Zulaikha (2012)	Pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap tingkat konservatisme akuntansi (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang	Dependen : Konservatisme Akuntansi Independen : (1) Proporsi komisaris independen (2) Ukuran	(1) proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi perusahaan (2) ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>terdaftar di BEI tahun 2008-2010).</p>	<p>dewan komisaris (3) Frekuensi pertemuan komite audit (4) Kompetensi komite audit (5) Ukuran Perusahaan</p>	<p>signifikan terhadap konservatisme akuntansi perusahaan (3) frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi perusahaan. (4) kompetensi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi perusahaan (5) ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi perusahaan</p>
<p>3. Dwi Ananda Putri (2017)</p>	<p>Pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.</p>	<p>Dependen : Konservatisme Akuntansi Independen : (1) Proporsi Komisaris Independen (2) Ukuran Dewan Komisaris (3) Frekuensi Pertemuan Komite Audit (4) Kompetensi Komite Audit</p>	<p>(1) Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi (2) Ukuran dewan komisi tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi (3) Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi (4) Kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi</p>

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4.	<p>Hans Hananto Andreas, Albert Ardeni, Paskah Ika Nugroho (2017)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Konservatime akuntansi di Indonesia.</p>	<p>Dependen : Konservatisme</p> <p>Independen : (1) <i>Company growth</i> (2) Profitability (3) Investment opportunity set</p>	<p>(1) <i>company growth</i> berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi (2) <i>profitability</i> berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi (3) Investment opportunity set berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi</p>
	<p>Ratna Wardhani (2008)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia dan hubungannya dengan karakteristik dewan sebagai salah satu mekanisme <i>corporate governance</i>.</p>	<p>Dependen : Konservatisme Akuntansi</p> <p>Independen : (1) Independensi Komisaris (2) Kepemilikan Perusahaan oleh Komisaris dan Direksi (3) Komite Audit</p>	<p>(1) Independensi Komisaris berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi (2) Kepemilikan Perusahaan oleh Komisaris dan Direksi berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi (3) Komite Audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi</p>
6.	<p>Fivi Anggraini dan Ira Trisnawati (2008)</p>	<p>Pengaruh <i>earnings management</i> terhadap konservatisme akuntansi.</p>	<p>Dependen : Konservatisme Akuntansi</p> <p>Independen : <i>Earnings Management</i></p>	<p>(4) <i>Earnings Management</i> berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi

Dalam menjalankan fungsinya, dewan komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi *board of director* (terutama komisaris independen) dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. *Board of director* yang kuat (*board of director* yang didominasi oleh komisaris independen) akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Di lain pihak, *board of director* yang didominasi oleh pihak internal atau *board of director* yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif dan kurang konservatif (Ahmed dan Duellman, 2007) (dalam Wardhani, 2008).

Berdasarkan teori agensi menyatakan bahwa perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai kondisi perusahaan menyebabkan para pemegang saham melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan tidak dapat memberikan informasi yang lengkap. Perusahaan memberikan informasi kepada para pemegang saham berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat di pertanggung jawabkan serta perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa yang mendatang. Keberadaan komisaris independen sangat dibutuhkan di dalam suatu perusahaan karena dapat memastikan bahwa perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memperlakukan pemegang saham dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jujur dan adil. Komisaris independen yang memiliki posisi yang kuat cenderung lebih menggunakan prinsip akuntansi yang konservatis untuk mensyaratkan informasi yang berkualitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2008), membuktikan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi

Ukuran anggota dewan komisaris merupakan elemen penting dari karakteristik dewan komisaris yang mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Penelitian Lara, *et al* (2005) (dalam Savitri, 2016:67) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat sebagai mekanisme *corporate governance* mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Komposisi anggota dewan komisaris yang seimbang dengan dewan direksi akan memudahkan komisaris dalam berdiskusi dengan dewan direksi dan mengawasi kinerja perusahaan. Dewan komisaris akan lebih menginginkan penerapan prinsip akuntansi yang konservatif untuk mencegah perilaku yang menyimpang dari direksi dan manajer.

Berdasarkan teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang besar melakukan aktivitas lebih banyak dari pada perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang kecil. Hal ini dapat menjadikan pusat perhatian kepada para pemegang saham untuk mengambil keputusan. Semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi. Dengan mengungkapkan informasi yang lebih banyak, dewan komisaris mencoba mengisyaratkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip yang sudah direncanakan. Dapat disimpulkan semakin tinggi ukuran dewan komisaris maka akan mempengaruhi perilaku manajer untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan tingkat konservatisme akuntansi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yustina (2012) membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

Frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi

Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin. Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, lebih objektif dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Porter dan Gendall, 1993) (dalam Wulandini dan Zulaikha, 2012) dan dalam hal menjaga informasi manajemen (McMullen dan Raghunandan, 1996) (dalam Wulandini dan Zulaikha, 2012).

Berdasarkan teori agensi menyatakan bahwa perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi. Perusahaan memberikan informasi kepada para pemegang saham yang berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat di pertanggung jawabkan oleh perusahaan. Dengan demikian komite audit akan melakukan pertemuan minimal 3 (tiga) bulan sekali atau 4 kali dalam setahun agar dapat melakukan evaluasi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas agar informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak merugikan para pemegang saham. Hasil dari rapat komite audit juga akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme. Berdasarkan penelitian Wulandini dan Zulaikha (2012), membuktikan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Manajemen laba berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Informasi yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan akuntansi seperti laporan keuangan.

Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer yang secara oportunistik mengelola laba dan memanfaatkan posisi sebagai manajer yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak luar perusahaan (Gul *et al.* 2002) (dalam Savitri, 2016:89). Akuntansi yang konservatif diperlukan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan kontrak dengan manajer. Contohnya, adanya perilaku oportunistik yang meningkatkan laba untuk mendapatkan kompensasi yang lebih baik membuat pemegang saham akan mendesak manajer untuk menggunakan akuntansi yang konservatif. Berdasarkan penelitian Anggraini dan Ira (2008) membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

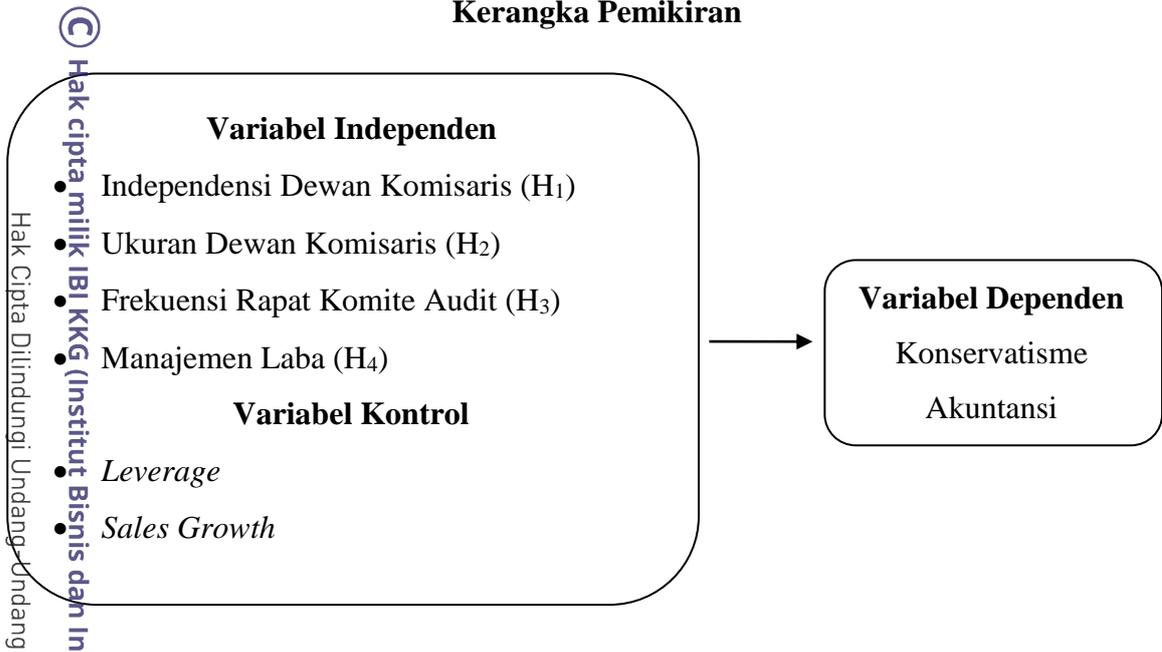
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
- H₂ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
- H₃ : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
- H₄ : Manajemen laba berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.